



Sukiryanto Akan Pimpin Kunker DPD RI ke Kalbar



SENANTOR - Senator asal Kalbar, Sukiryanto (pojok kanan), bersama tiga senator dari Kalbar lainnya, yakni Erlinawati, Maria Goreti, dan Christiandy Sanjaya.

PONTIANAK, TRIBUN - Senator asal Kalbar, Sukiryanto, mengungkapkan, jika pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kalbar. Kunjungan kerja yang akan dilaksanakan pada 21-23 Oktober kedepan ini, dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester 1 BPK 2019. "Komite IV DPD RI akan kunker ke Kalimantan Barat dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2019, yang *Insy Allah* didampingi sekjen BPK RI," kata Sukiryanto, Kamis (17/10).

Kegiatan yang akan dipimpinya sebagai Wakil ketua 1 Komite IV DPD RI ini sekaligus silaturahmi ke Gubernur Kalbar. Lebih lanjut, ia mengatakan jika Komite IV DPD RI sepakat mengajukan sepuluh usulan rancangan undang-undang sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI tahun 2019.

Hal ini dijelaskan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, saat memimpin rapat kerja pembahasan dan pengesahan program dan jadwal Komite IV Masa Sidang I 2019-2020.

Seperti diketahui, Komite IV DPD RI adalah alat

kelengkapan yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk itu, pada tahun 2019 ini terdapat sepuluh RUU yang akan dibahas yakni RUU tentang Penyusunan & Pertanggungjawaban APBN & APBD, RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Sistem Perencanaan & Penganggaran Daerah, RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RUU tentang Pengelolaan Barang Daerah, RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), RUU tentang Lembaga Keuangan Syariah, RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan RUU Investasi Penanaman & Permodalan Daerah.

Dalam kesempatan itu, anggota Komite IV lainnya, Aji Padindang menyoroiti salah satu RUU

yakni RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurutnya undang-undang yang ada saat ini belum secara komprehensif mencakup ketentuan pajak di daerah.

"Ini akan menjadi payung bagi seluruh peraturan pajak daerah apakah itu pajak kendaraan bermotor, properti, pajak bumi dan bangunan, seluruh ketentuan umum tentang pajak daerah, termasuk pembagiannya dengan pusat" ujar senator asal Sulawesi Selatan ini.

Senada dengan Aji, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan perlunya sinkronisasi pembagian pajak antara pusat dan daerah, karena pajak berkaitan langsung dengan masyarakat. "Saya contohkan untuk di pembelian property dikenakan PPh 5 persen dan PPN 10 persen, belum untuk nilai tertentu dikenakan lagi PPNPB, semuanya untuk pusat sedangkan daerah hanya dapat dari BPHT saja, ini perlu pemahaman bersama," ujar senator asal Kalimantan Barat ini. **(dho)**